

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan umum memegang peranan sentral dalam sistem demokrasi modern sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan sarana pembentukan pemerintahan yang sah sesuai dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Pemilih dalam pemilihan umum berasal dari berbagai kelompok sosial, termasuk individu dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari yang masih sekolah hingga yang telah menyelesaikan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi (Pratiwi et al., 2025).

Keragaman latar belakang pemilih menjadikan strategi kampanye dalam pemilu tidak hanya berfokus pada penyampaian visi dan misi, tetapi juga pada kemampuan kandidat membangun kedekatan emosional dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan politik tidak lagi semata-mata bersandar pada rasionalitas pemilih, melainkan juga pada sentimen dan persepsi emosional yang dibentuk melalui isu-isu kesejahteraan publik. Salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut adalah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Prabowo Subianto, program yang kemudian menjadi sorotan utama dalam wacana politik nasional.

Program MBG yang dicanangkan pasangan Prabowo–Gibran ini bertujuan mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di Indonesia. Stunting sendiri merupakan masalah besar dengan prevalensi yang masih tinggi, meski telah menunjukkan penurunan signifikan beberapa tahun terakhir. Program ini menargetkan kelompok pelajar dan keluarga miskin, terutama yang tinggal di daerah tertinggal (CISDI, 2024).

Namun, kebijakan MBG bukan sekadar cerminan komitmen pemerintah terhadap isu kesejahteraan sosial, ia juga bisa dipandang sebagai strategi untuk merangkul dan membangun dukungan dari kelompok masyarakat luas. Di banyak negara, pemerintah memanfaatkan program sosial sebagai alat untuk memperkuat dukungan politik dengan membingkai bantuan sebagai hak nyata bagi mayoritas yang mewakili rakyat (Chueri, 2022). Janji kesejahteraan yang digaungkan sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya di lapangan, sehingga berpotensi membuat dampaknya pada kesejahteraan jangka panjang kelompok rentan menjadi minimal (Moise, 2021). Penelitian lain mengkaji implikasi respons afektif terhadap demokrasi dan menemukan bahwa meskipun emosi politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih, tingginya polarisasi afektif justru berkorelasi dengan menurunnya toleransi terhadap oposisi dan meningkatnya dukungan buta terhadap pemimpin (Phillips, 2024).

Di sisi lain, MBG juga menjadi program yang cukup kontroversial. Sebagai bagian dari program prioritas, pemerintah menetapkan target efisiensi anggaran sebesar USD 44 miliar (sekitar Rp750 triliun) pada tahun pertama kepemimpinan untuk mendanai program ini bersama dengan BPI Danantara (Theodora, 2025).

Kebijakan efisiensi anggaran ini turut berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk kementerian dan lembaga yang terpaksa menyesuaikan pengelolaan sumber daya mereka (FEB UNESA, 2025). Pada April, tercatat lebih dari 200 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Temuan di lapangan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal, baik dari kandungan protein, vitamin, maupun variasi menu. Di sejumlah sekolah, ada laporan penyajian telur rebus yang tidak layak konsumsi, bahkan di beberapa lokasi, siswa memilih membuang makanan karena rasanya tidak dapat diterima (Akbar, 2025).

Realitas ini menggarisbawahi pentingnya memahami opini publik, yaitu bagaimana masyarakat menerima, menafsirkan, dan memaknai informasi serta kebijakan yang beredar. Opini publik tidak hanya dibentuk oleh fakta, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh motivasi, sikap, dan tingkat pengetahuan individu, yang pada gilirannya dapat membuat kelompok masyarakat memiliki tingkat kerentanan yang berbeda (Krishna et al., 2025).

Dukungan publik sangat vital bagi keberhasilan kebijakan, sebab penerimaan masyarakat yang luas adalah kuncinya. Dukungan ini sebagian besar dibentuk oleh opini publik, khususnya tentang keadilan dan efektivitas program. Kebijakan dianggap adil jika manfaatnya dirasakan merata dan sesuai dengan identitas kelompok tertentu (Hoyle & Rhodes, 2025).

Pada Pemilihan Presiden 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih dukungan

signifikan dengan total 1.097.070 suara, jauh melampaui pasangan lain yang hanya meraih suara di kisaran 100 ribu hingga 200 ribu (Muliawati, 2024). Kondisi ini menunjukkan dominasi basis elektoral Prabowo–Gibran di provinsi tersebut.

Mengingat implementasi kebijakan MBG secara nasional yang menimbulkan kontroversi signifikan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif respons afektif masyarakat Kalimantan Tengah terhadap program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah *Affective Intelligence Theory* (AIT) untuk memahami bagaimana aspek psikologis dan emosi afektif membentuk reaksi dan penilaian masyarakat terhadap kebijakan MBG.

Respons afektif sendiri merujuk pada dimensi emosional dan perasaan yang dialami individu dalam merespons stimulus politik tertentu. Dalam konteks ilmu politik, respons afektif mencakup reaksi emosional seperti antusiasme, kecemasan, kemarahan, atau kepercayaan yang muncul ketika masyarakat menghadapi kebijakan, tokoh politik, atau isu-isu publik. Berbeda dengan respons kognitif yang bersifat rasional dan berbasis informasi, respons afektif beroperasi pada level emosional yang sering kali terjadi secara spontan dan dapat memengaruhi opini serta perilaku politik individu (Yunita et al., 2014). Studi kontemporer menunjukkan bahwa respons afektif tidak hanya melengkapi proses kognitif, tetapi sering kali mendahului dan membentuk bagaimana informasi politik diproses serta diinterpretasikan oleh publik (Marcus, 2013).

Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah respons afektif masyarakat terhadap pasangan Prabowo–Gibran dan program MBG masih didominasi oleh sikap loyal tanpa kritis (*blind support*), atau justru mulai

berkembang menjadi sikap yang lebih reflektif dan evaluatif (*fair assessment*) setelah pelaksanaan kebijakan yang kontroversial. Pendekatan ini menjadi relevan karena konteks politik Kalimantan Tengah secara substansial mayoritas mendukung pasangan tersebut, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana faktor afektif memengaruhi sikap serta dukungan publik terhadap kebijakan sosial di wilayah ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana respons afektif masyarakat Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Pemilihan Presiden 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi respons afektif publik terhadap program MBG di Kalimantan Tengah setelah implementasinya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons afektif masyarakat di Kalimantan Tengah terhadap implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan pasca-Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi respons afektif masyarakat terhadap program tersebut, dengan mempertimbangkan variasi usia, latar belakang pendidikan, dan faktor relevan lainnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana respons

afektif masyarakat terhadap kebijakan MBG di berbagai segmen masyarakat setelah program tersebut berjalan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu politik sebagai berikut:

- a) **Pengembangan Studi Psikologi Politik:** Memberikan gambaran empiris mengenai penerapan *Affective Intelligence Theory* (AIT) dalam melihat respons masyarakat terhadap kebijakan pembagian bantuan. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana emosi antusiasme dan kecemasan bekerja sebagai alat penilaian warga terhadap kinerja nyata pemerintah di lapangan.
- b) **Pengayaan Literatur Kebijakan Sosial:** Menambah referensi mengenai dinamika penerapan program pemberian makanan gratis secara merata di tingkat daerah. Penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana kebijakan berskala besar menghadapi tantangan nyata berupa kondisi geografis dan ketimpangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
- c) **Penyediaan Hubungan Emosi dan Kebijakan Publik:** Menjadi acuan akademik yang menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari selesainya urusan administrasi, melainkan sangat bergantung pada kepuasan emosional warga atas kualitas pelayanan langsung di tingkat bawah.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program di lapangan:

- a) **Bagi Pemerintah:** Sebagai bahan evaluasi strategis dalam memperbaiki manajemen logistik serta pengawasan ketat terhadap kualitas penyedia makanan (vendor) melalui unit Satuan Pelayanan Program Gratis (SPPG). Temuan mengenai kekhawatiran warga akibat penurunan kualitas makanan dapat menjadi dasar penyusunan standar kontrol yang lebih ketat demi menjaga kepercayaan publik.
- b) **Bagi Perencana Anggaran:** Memberikan wawasan mengenai pentingnya keterbukaan anggaran lintas sektor, khususnya agar pemerintah lebih bijak dalam melakukan alokasi anggaran program tanpa mengorbankan sektor esensial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan dasar di daerah.
- c) **Bagi Masyarakat:** Menyediakan informasi mengenai dampak nyata program terhadap pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong partisipasi aktif orang tua dan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan mandiri terhadap mutu makanan yang dibagikan.
- d) **Pemerataan Distribusi:** Memberikan rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan di Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi jalur distribusi di wilayah pedalaman guna menghilangkan perasaan dikesampingkan pada warga pelosok dan memastikan pembagian program yang merata bagi seluruh penerima manfaat.

## 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berpijak pada tulisan Prior & Hoef (2018), kajian mengenai respons afektif dalam ilmu politik telah lama menjadi diskursus penting, terutama terkait bagaimana emosi berperan dalam pembentukan opini publik dan dukungan terhadap kebijakan. Tradisi ilmu politik klasik cenderung menempatkan emosi dalam ranah privat yang dianggap tidak relevan dengan pengambilan keputusan publik, berdasarkan asumsi bahwa politik seharusnya rasional, objektif, dan berbasis kepentingan yang terukur. Namun, dikotomi antara akal dan emosi tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika politik kontemporer. Manifestasi afektif ternyata justru mendasari banyak praktik demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena ketidakpercayaan terhadap elite, bangkitnya gerakan sosial baru, dan penggunaan retorika emosional dalam kampanye politik menunjukkan bahwa emosi tidak bisa lagi dipandang sebagai faktor pinggiran, melainkan sebagai komponen sentral dalam politik modern.

Di sisi lain, perdebatan metodologis juga memperkaya literatur mengenai studi afektif. Banyak penelitian terdahulu masih menghadapi keterbatasan dalam mengukur emosi politik secara langsung. Bakker et al. (2021) menyoroti bahwa sebagian besar studi hanya mengandalkan indikator tidak langsung, misalnya pengukuran *arousal* (intensitas respons emosional) atau *valence* (arah positif-negatif dari emosi). Keterbatasan ini membuat analisis politik sering kali terjebak pada interpretasi sempit yang tidak mampu menangkap kompleksitas emosi politik. Dengan mengusulkan model *circumplex* sebagai pendekatan inti, penelitian mereka



memperluas pemahaman bahwa emosi politik memiliki dimensi berlapis dan saling berkaitan. Hal ini penting, karena membuka ruang bagi peneliti untuk melihat emosi bukan sekadar variabel tambahan, melainkan faktor yang mampu mengubah arah komunikasi kebijakan.

Sementara itu, studi lain berfokus pada pergeseran dari level individual menuju level kolektif. Pliskin & Halperin (2021) mencatat adanya kecenderungan peneliti mengadopsi pendekatan psikologi individual tanpa mempertimbangkan konteks politik yang lebih luas. Fenomena ini mereka sebut sebagai *copy-paste syndrome*, di mana teori psikologi dasar digunakan tanpa adaptasi yang memadai terhadap realitas politik. Padahal, emosi politik tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dibentuk, diperkuat, dan diekspresikan dalam interaksi sosial maupun dinamika kelompok. Kurangnya kajian lintas disiplin membuat pemahaman kita tentang emosi kolektif, seperti polarisasi afektif atau solidaritas emosional, masih terbatas. Padahal, fenomena kolektif inilah yang sering kali menjadi dasar penguatan dukungan politik, baik dalam konteks kampanye yang menyentuh hati warga maupun penerimaan terhadap kebijakan publik.

Selain perdebatan konseptual, literatur juga memperlihatkan bagaimana emosi berkaitan dengan kebijakan sosial. Pendekatan kebijakan yang berfokus pada janji kesejahteraan, misalnya, dapat dipahami sebagai gaya politik yang menekankan klaim representasi rakyat dan kritik terhadap elit. Gusti et al. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan berorientasi kerakyatan di Indonesia sering lahir sebagai respons atas ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Namun, kebijakan jenis ini juga mengandung dilema: alih-alih memperkuat demokrasi, ia

justeru berpotensi melemahkan upaya perlindungan lingkungan dan menimbulkan skeptisisme sosial. Muksinin & Aminah (2021). Hal serupa terlihat dalam studi Asante (2023) di Ghana bahkan menunjukkan bahwa kebijakan yang digerakkan oleh kepentingan elektoral jangka pendek sering kali gagal mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, retorika janji politik hanya memperkuat praktik ketergantungan politik (timbang-balik) tanpa menghasilkan transformasi struktural.

Khusus pada kebijakan makan bergizi, literatur memperlihatkan kompleksitas serupa. Yusriadi (2025) menyoroti bahwa meskipun kebijakan makan bergizi mampu meningkatkan akses gizi dan hasil pendidikan keluarga miskin, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada pendanaan yang konsisten, integrasi dengan sistem pangan lokal, dan koordinasi lintas sektor. Rudiyanto (2024) bahkan menambahkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi berbagai kendala logistik, standar mutu yang tidak konsisten, hingga kasus keracunan massal. Situasi ini memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat menentukan kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Dimensi afektif publik juga dipengaruhi oleh peran media dalam membentuk opini Liu et al. (2023) menunjukkan bahwa opini positif masyarakat terhadap transparansi anggaran memperkuat dukungan publik, sementara Mao & Hao (2024) menegaskan bahwa pemberitaan negatif, misalnya soal keracunan makanan, dapat menciptakan persepsi risiko yang membesar. Soon (2020) menambahkan bahwa narasi media, terutama bila menyangkut isu sensitif seperti

keamanan anak, dapat memperkuat rasa takut dan resistensi publik. Dalam konteks berbeda, Wang et al. (2024) menemukan bahwa *framing* media selama pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kepatuhan publik: *framing* positif berbasis data ilmiah menumbuhkan pemahaman rasional, sedangkan *framing* negatif memperbesar kecemasan dan ketidakpercayaan.

Lebih lanjut, sejumlah penelitian mutakhir juga mengungkapkan adanya kelemahan konseptual dan metodologis dalam studi emosi politik yang relevan dengan penelitian ini. Lu et al. (2023) misalnya, menegaskan bahwa penggunaan *Affective Intelligence Theory* (AIT) dalam kajian kebijakan sering kali terlalu menyederhanakan dimensi emosi, hanya terbatas pada polarisasi emosional umum atau ekspresi parsial. Akibatnya, kesempatan untuk menggali secara lebih mendalam peran komponen emosional yang lebih beragam menjadi terabaikan. Selain itu, mereka juga menyoroti adanya kesenjangan metodologis karena penelitian-penelitian sebelumnya kurang menjelaskan secara granular bagaimana tiap dimensi emosional berkontribusi secara berbeda terhadap proses implementasi kebijakan, terutama dalam situasi krisis.

Di sisi lain, keterbatasan dalam pengukuran kebijakan juga menjadi sorotan dalam literatur. Pilar et al. (2022) mengungkapkan bahwa banyak instrumen pengukuran kebijakan masih bersifat satu kali penggunaan, tanpa proses validasi yang memadai. Selain itu, aspek psikometrik seperti reliabilitas dan validitas sering kali tidak dilaporkan secara sistematis. Masalah lain yang diangkat adalah kurangnya perhatian pada faktor lingkungan luar (*outer setting*) yang justru penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kelemahan serupa juga

ditegaskan oleh Proctor et al. (2011) yang menemukan bahwa instrumen dalam riset implementasi masih belum konsisten secara terminologis, dengan lemahnya standar dalam mengukur ketepatan kebijakan, serta ketidakjelasan pada level analisis apakah individual, organisasi, atau sistem.

Dalam konteks opini publik, Lu (2025) menambahkan bahwa pengukuran emosi politik masih sangat terbatas karena umumnya bergantung pada *poll-based emotion consensus messaging* atau konsensus emosi berbasis jajak pendapat. Instrumen ini hanya mampu menangkap gambaran emosional secara umum dan cenderung bias pada konteks tertentu. Lebih jauh, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa efek afektif terhadap dukungan kebijakan hanya signifikan pada partisipan yang tidak menganggap isu politik sebagai hal penting, sehingga ruang lingkup validitas penelitian menjadi terbatas. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kajian afektif butuh pendekatan yang lebih kontekstual dan mendalam agar mampu menjelaskan variasi emosi publik terhadap kebijakan secara lebih akurat.

Keterbatasan dalam instrumen pengukuran emosi juga menjadi perhatian dalam tinjauan yang lebih luas. Mauss & Robinson (2009) menekankan bahwa tidak ada satu pun ukuran yang dapat dijadikan standar pasti dalam mengukur emosi. Korelasi antar berbagai instrumen pengukuran emosi pun hanya moderat, bahkan kecil dalam banyak penelitian, dan hasilnya sering kali inkonsisten. Hal ini memperlihatkan adanya fragmentasi konseptual, di mana konstruksi emosi terlalu kompleks untuk ditangkap hanya dengan satu pendekatan pengukuran. Temuan ini menimbulkan implikasi penting: setiap penelitian yang menelaah emosi politik

perlu secara sadar memilih dan mengombinasikan instrumen yang relevan agar hasilnya tidak bias.

Keterbatasan serupa juga muncul dalam penelitian emosi publik di media sosial. (Zhang et al., 2023) menunjukkan bahwa sebagian besar studi hanya berfokus pada satu platform, misalnya Twitter atau Weibo, sehingga kurang representatif dalam menjelaskan dinamika emosi populasi yang lebih luas. Selain itu, pengukuran temporal atas perubahan emosi cenderung lemah, padahal dalam kenyataan sosial, emosi publik dapat berubah dengan cepat ketika kebijakan berganti atau krisis baru muncul. Winkler & Appel (2024) menegaskan bahwa penggunaan metode *self-report* untuk mengukur pengalaman emosional juga sarat dengan bias, baik karena efek sosial (*social desirability bias*) maupun karena masalah reaktivitas ketika responden harus merefleksikan emosi mereka di tengah atau setelah paparan stimulus media. Mereka juga menekankan bahwa berbagai komponen emosi tidak bisa dipertukarkan begitu saja, sehingga diperlukan desain riset yang mampu memisahkan secara jelas aspek kognitif, fisiologis, dan afektif.

Lebih jauh lagi, Gumah & Aziabah (2020) menyoroti keterbatasan pendekatan survei persepsi publik terhadap kinerja layanan pemerintah. Survei semacam ini memang bermanfaat untuk mengukur efisiensi dan kepuasan, tetapi cenderung mengabaikan faktor emosional yang memengaruhi cara masyarakat menilai kebijakan. Dengan kata lain, ada celah besar antara data teknokratis mengenai efisiensi layanan dan realitas afektif warga yang sesungguhnya menentukan dukungan atau resistensi publik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada persepsi masyarakat, seperti penilaian rasional atas efektivitas, keadilan, dan manfaat program. Namun, respons afektif yakni reaksi emosional seperti antusiasme, kecemasan, dan kemarahan juga berperan penting dalam membentuk opini dan dukungan publik terhadap kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis respons afektif masyarakat, tanpa mengabaikan konteks persepsi publik yang telah banyak dibahas dalam studi terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini secara khusus mendalami dimensi respons afektif masyarakat terhadap kebijakan, sebagai kelanjutan dan pendalaman dari wacana persepsi publik yang dominan pada kajian sebelumnya.

### **1.5.2. Kerangka Teori**

#### **1.5.2.1. Opini Publik dalam Kebijakan**

Opini publik merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika kebijakan dan proses politik. Diermeier dan Schnabel, dengan mendasarkan pada model psikologi politik Zaller (1992), mengembangkan teori formal tentang opini publik yang menekankan sifatnya yang dinamis. Opini publik tidak dipandang sebagai sikap yang sudah mapan dalam benak individu, melainkan terbentuk dari pertimbangan-pertimbangan kontekstual yang dipengaruhi eksposur media, wacana elit, dan memori individu. Dengan demikian, opini publik merupakan hasil agregasi dari berbagai pertimbangan yang bobotnya berbeda-beda pada setiap individu. Kerangka ini membantu menjelaskan fenomena instabilitas opini, pengaruh media, *framing*, *agenda setting*, hingga polarisasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana agregasi opini massa mampu meredam volatilitas

individu dan menciptakan pola kolektif yang relatif terprediksi dalam masyarakat (Diermeier & Schnabel, 2025).

Perkembangan konsep opini publik pada awal abad ke-20 terbentuk melalui perdebatan klasik antara Walter Lippmann dan John Dewey. Lippmann melihat publik sebagai aktor yang pasif dan mudah dipengaruhi media, sementara Dewey lebih optimis bahwa opini publik dapat menjadi landasan demokrasi sejauh tersedia ruang diskusi yang sehat. Kajian mereka juga menyoroti berbagai model efek media terhadap opini publik, mulai dari teori *magic bullet* yang menekankan kekuatan besar media, hingga teori *two-step flow* yang menegaskan peran pemimpin opini dan interaksi sosial sebagai kanal sekaligus filter pengaruh media (Moy & Bosch, 2013).

Sementara itu, Kertzer menyoroti pendekatan psikologi politik dalam memahami opini publik, terutama di bidang kebijakan luar negeri. Ia membedakan dua model utama: pendekatan *top-down* yang menekankan pengaruh elit politik dan partai melalui pemberian isyarat serta *framing*, dan pendekatan *bottom-up* yang melihat opini publik terbentuk dari nilai dasar, identitas, dan orientasi ideologis yang relatif stabil. Kertzer juga menekankan pentingnya dimensi afektif dan kognitif dalam membentuk opini publik, serta kontribusi survei dan eksperimen dalam mengungkap struktur dan sumber opini publik di era kontemporer (Kertzer, 2021).

Dengan demikian, teori opini publik memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah membentuk sikap dan

respons terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), baik melalui pengaruh elit politik, *framing* media, maupun dinamika nilai dan identitas sosial.

#### **1.5.2.2. *Affective Intelligence Theory* (AIT) dalam Analisis Opini Kebijakan**

Dalam kajian ilmu politik, opini publik sering diposisikan sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi proses kebijakan. Kyselá (2018) menyebutkan bahwa opini publik bukan sekadar keadaan pikiran kolektif yang dapat diukur melalui survei, melainkan sebuah proses komunikasi dan organisasi sosial yang berkelanjutan. Opini publik terbentuk melalui interaksi dinamis antara kelompok masyarakat, media, organisasi, dan aktor negara. Oleh karena itu, dukungan publik terhadap suatu kebijakan lebih tepat dipandang sebagai hasil sementara dari proses komunikasi yang terus berubah.

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa opini publik tidak hanya dibentuk oleh informasi rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh respons afektif. Respons afektif dalam konteks politik merupakan evaluasi emosional yang muncul ketika individu menilai makna suatu peristiwa politik bagi kesejahteraan mereka. Respons afektif ini mencakup perasaan seperti kecemasan, kemarahan, atau antusiasme, yang berperan dalam memperkuat atau melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbeda dengan emosi diskrit yang lebih spesifik, respon afektif dipahami sebagai reaksi awal berbasis penilaian otak terhadap situasi politik, yang kemudian memicu emosi-emosi tertentu dan mengarahkan perilaku politik (Erhardt et al., 2021).

Berdasarkan literatur di atas, penelitian ini menggunakan beberapa konsep kunci yang dijadikan landasan teori: respons afektif dan regulasi emosi dalam



komunikasi kebijakan. *Affective Intelligence Theory* (AIT) dikembangkan oleh Marcus (2013) dari dasar pemikiran Jeffrey Gray pada tahun 1987.

Sistem utama dalam AIT meliputi:

- a) **Sistem Disposisi (*Disposition System*)**: mencakup antusiasme yang memperkuat partisipasi politik, serta kemarahan yang justru menguatkan kepatuhan pada ideologi yang telah dianut.
- b) **Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)**: mencakup kecemasan/ketakutan yang memicu pencarian informasi lebih luas, deliberasi terbuka, bahkan perubahan pandangan politik.
- c) **Mekanisme Neuropsikologis**: menekankan bahwa emosi muncul dari sirkuit otak yang berbeda dan dapat terjadi secara paralel, tanpa memerlukan evaluasi kognitif terlebih dahulu.

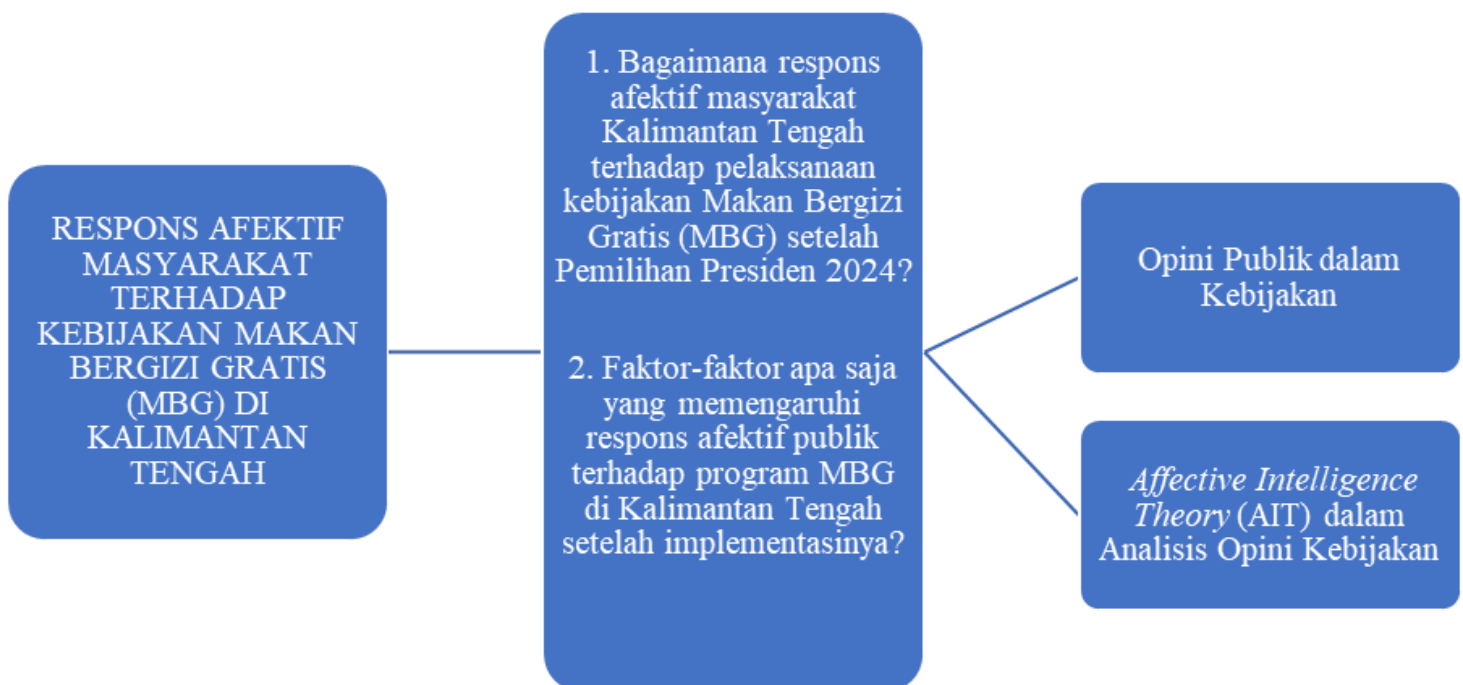
Seluruh dimensi ini dideskripsikan dalam penelitian Marcus et al. (2019).

Kemarahan dan antusiasme cenderung memperkuat keyakinan yang sudah ada dan membuat individu kurang terbuka pada informasi baru. Dinamika emosi ini tidak hanya internal, tetapi juga memiliki peran sosial kuat, terbentuk dan diekspresikan melalui interaksi dengan orang lain, termasuk dalam konteks *social viewing* atau diskusi konten media secara daring (Lee & Choi, 2018).

Persepsi publik penting karena emosi berperan aktif dalam cara masyarakat memahami isu, menilai, dan berpartisipasi dalam demokrasi. AIT menegaskan bahwa reaksi emosional membentuk persepsi ini misalnya, kecemasan mendorong pencarian informasi dan peninjauan ulang pandangan. Selain itu, tiap ancaman politik memicu emosi berbeda dengan konsekuensi perilaku yang tidak sama.

Pemahaman ini krusial untuk melihat bagaimana emosi memengaruhi persepsi, loyalitas, dan pilihan politik publik (Marcus et al., 2019). Dengan demikian, AIT digunakan untuk menganalisis bagaimana kecemasan, antusiasme, dan kemarahan masyarakat Kalimantan Tengah memengaruhi persepsi publik terhadap MBG.

Kedua kerangka teori di atas saling melengkapi dalam menganalisis respons publik terhadap kebijakan MBG. Teori opini publik memberi dasar untuk memahami bagaimana sikap masyarakat terbentuk melalui interaksi informasi, penjelasan tokoh politik, dan nilai sosial. Sementara itu, *Affective Intelligence Theory* (AIT) menjadi teori inti yang memperdalam analisis dengan menjelaskan bagaimana sirkuit antusiasme dan kecemasan masyarakat mengarahkan opini mereka setelah melihat pelaksanaan nyata program MBG di lapangan.



## 1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan konsep utama menjadi indikator konkret yang dapat diamati melalui survei atau wawancara mendalam. Respons afektif publik terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dioperasionalkan menjadi beberapa kategori emosi utama sesuai *Affective Intelligence Theory* (AIT), yaitu:

- a) **Antusiasme** (indikator: ekspresi dukungan aktif, keyakinan akan keberlanjutan MBG, harapan pada hasil program),
- b) **Kemarahan** (indikator: kekecewaan dan keluhan terhadap kualitas program, penolakan, atau protes publik),
- c) **Kecemasan** (indikator: kekhawatiran terkait keamanan, ketidakpastian distribusi MBG, keraguan terhadap efektivitas program).

Persepsi terhadap kualitas MBG diukur melalui penilaian langsung masyarakat atas efektivitas pelaksanaan, standar pemenuhan gizi, pemerataan manfaat bagi penerima, serta transparansi dalam pengelolaan program. Penilaian ini penting untuk melihat bagaimana realitas operasional di lapangan memicu munculnya dinamika respons afektif (antusiasme, kemarahan, atau kecemasan) di tengah masyarakat Kalimantan Tengah.

Semua indikator ini dirumuskan sebagai pertanyaan dalam kuesioner pilihan ganda dan pedoman wawancara semi-terstruktur, agar memungkinkan pengukuran baik secara kuantitatif (survei) maupun kualitatif (wawancara naratif dengan informan kunci) secara mendalam dan kontekstual. Setiap dimensi respons afektif diukur menggunakan beberapa butir pernyataan dalam kuesioner,

yaitu: antusiasme (7 item), kecemasan (6 item), kemarahan (6 item), dan persepsi kualitas program MBG (4 item), dengan total 23 item. Rincian butir pernyataan disajikan pada lampiran instrumen penelitian.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods research*, yaitu pendekatan yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. *Mixed methods* sangat cocok diterapkan dalam mengeksplorasi isu-isu sosial yang kompleks karena mampu memberikan jawaban lebih komprehensif, menunjang analisis relasi antarvariabel, serta memungkinkan triangulasi data agar hasil penelitian menjadi lebih valid. Dengan mengintegrasikan kelebihan masing-masing metode, desain ini mampu menjawab pertanyaan penelitian secara lebih luas dan mendalam dibandingkan jika hanya memakai satu pendekatan saja. Selain itu, *mixed methods* juga menawarkan fleksibilitas metodologis dan mampu merepresentasikan berbagai sudut pandang peserta penelitian (Sharma et al., 2023).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren dan hubungan antardata berdasarkan statistik survei, sekaligus menggali pengalaman dan persepsi peserta lewat wawancara, observasi, ataupun analisis narasi. Salah satu desain utama yang sering digunakan adalah *convergent parallel design*, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan bersamaan, dianalisis terpisah, lalu digabungkan untuk memperoleh interpretasi hasil yang lebih menyeluruh (McLeod, 2025).

Teknik *criterion sampling* digunakan untuk mengidentifikasi dan memilih kasus atau individu yang memenuhi kriteria kepentingan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, partisipan riset diambil dari lembaga, organisasi, atau sistem yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan. Individu dipilih berdasarkan asumsi bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pengalaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga menjadi sumber data yang kaya informasi (Palinkas et al., 2015).

Meskipun demikian, teknik ini memiliki keterbatasan dalam menangkap keseimbangan antara keluasan (*breadth*) dan kedalaman (*depth*) analisis jika hanya berfokus pada satu kelompok peran tertentu yang berisiko mengabaikan perspektif dari kelompok lain seperti konsumen atau pembuat kebijakan. Oleh karena itu, guna mencapai pemahaman yang komprehensif, penerapan teknik ini harus dirancang secara inklusif dengan melibatkan variasi aktor yang merepresentasikan berbagai peran berbeda dalam seluruh ekosistem implementasi program (Palinkas et al., 2015). Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini secara sengaja menggunakan kriteria informan lintas peran, yakni dengan menjaring suara masyarakat atau warga (orang tua murid, guru, atau masyarakat yang terpapar informasi terkait program MBG) sebagai kelompok konsumen langsung, sekaligus melibatkan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku aparatur pelaksana teknis.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi target program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus pada dua

karakteristik ruang utama: daerah perkotaan (urban) yang diwakili oleh Kota Palangka Raya, Sampit (Kotawaringin Timur), dan Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat), serta daerah perdesaan pedalaman (rural) yang diwakili oleh wilayah Tumbang Samba (Kabupaten Katingan). Dimensi waktu penelitian dimulai sejak awal implementasi MBG tahun 2025 hingga proses pengambilan data pada 2026. Lingkup substansi mencakup dinamika respons afektif (antusiasme, kecemasan, kemarahan) masyarakat terhadap efektivitas, kualitas, serta dampak MBG pasca-pelaksanaan. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis manajemen program, melainkan lebih menitikberatkan pada pemetaan pengalaman emosional dan dinamika psikologi politik masyarakat di tingkat tapak.

### **1.7.3. Informan Penelitian**

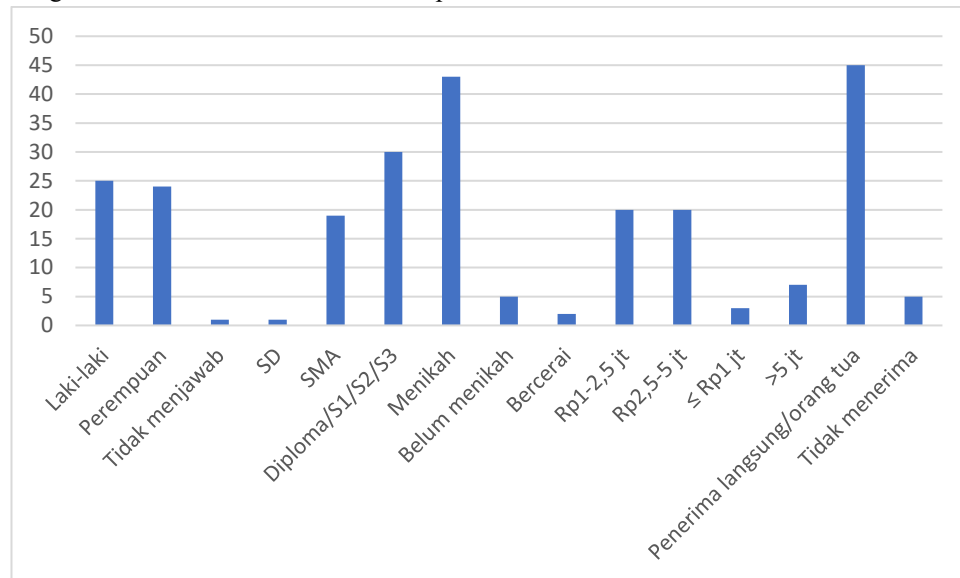
Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer yang diperoleh dari dua kelompok subjek penelitian di Kalimantan Tengah untuk mendapatkan gambaran respons afektif yang komprehensif.

#### **1.7.3.1. Responden Survei Kuantitatif**

Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *criterion sampling*. Responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung atau terpapar informasi terkait kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah. Survei melibatkan 50 responden mayoritas wilayah perkotaan (Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun). Profil responden didominasi perempuan menikah, berpendidikan tinggi (S1+, 60%), dan berpendapatan menengah (Rp1–5 juta, 80%). Sebanyak 90% responden adalah orang tua atau wali murid penerima manfaat MBG. Konfigurasi ini selaras dengan kemenangan

Prabowo-Gibran di Kalteng pada Pemilu 2024. Namun, keterbatasan sampel di wilayah perdesaan dan kelompok berpendapatan rendah ( $\leq$ Rp1 juta, 6%) memerlukan data kualitatif mendalam sebagai langkah triangulasi.

Diagram 1: Distribusi Karakteristik Responden Survei



Sumber: Frequencies Analysis SPSS, 14 Jan 2026

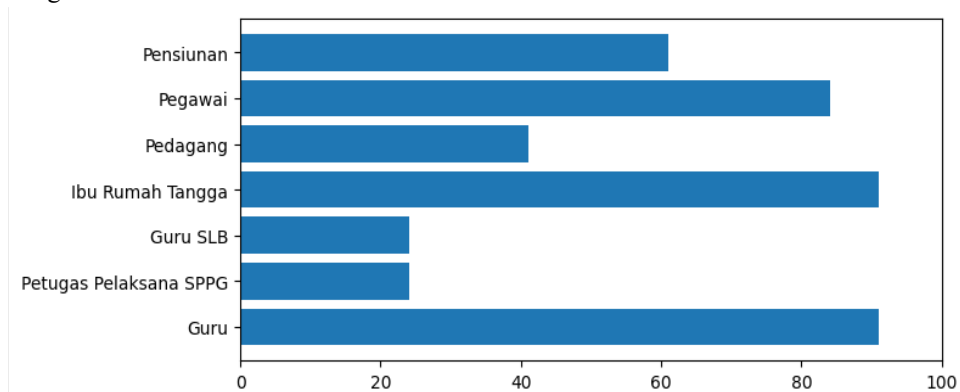
### 1.7.3.2. Informan Wawancara Kualitatif

Untuk memperdalam dan mengonfirmasi temuan survei makro tersebut, dilakukan wawancara mendalam terhadap 11 orang informan kunci yang dipilih berdasarkan pemenuhan kriteria peran (*criterion sampling*). Guna menangkap keragaman emosi (kecemasan maupun antusiasme) secara utuh, informan dipilih dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari guru, ibu rumah tangga, wiraswasta, hingga pensiunan.

Lebih lanjut, guna menjamin keseimbangan perspektif ruang dan mengatasi keterbatasan data survei perkotaan, penentuan informan kualitatif ini sengaja memperluas jangkauan wilayah hingga ke sektor perdesaan pedalaman (rural), yakni dengan memasukkan unsur pelaksana teknis lapangan dari Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Tumbang Samba, Kabupaten Katingan. Kehadiran informan dari wilayah pedalaman hulu ini sangat krusial untuk membenturkan realitas pelayanan di pusat kota dengan tantangan logistik riil masyarakat di wilayah pelosok.

Diagram 2: Profil Informan Wawancara Kualitatif



**Sumber :** Dokumen Wawancara Pribadi, Januari-Juni 2026

Pemilihan subjek penelitian dengan karakteristik yang beragam ini bertujuan untuk menguji asumsi *Affective Intelligence Theory*, yaitu apakah respons emosional masyarakat Kalimantan Tengah lebih didorong oleh loyalitas politik (sistem disposisi) atau oleh penilaian objektif terhadap kualitas implementasi kebijakan di lapangan (sistem surveilans).

#### 1.7.4. Sumber dan Jenis Data

##### 1.7.4.1. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data primer kuantitatif dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur dan melibatkan minimal 50 responden, sehingga hasil yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik untuk memetakan tren dan pola persepsi masyarakat. Sementara data kualitatif diperoleh lewat wawancara mendalam dengan 11 utama, jumlah yang telah memenuhi prinsip *saturation* sesuai



rekomendasi Sim et al., (2018), sehingga kualitas dan kedalaman temuan tetap terjaga.

#### **1.7.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan MBG, serta pemberitaan media digunakan untuk memperkaya dan memvalidasi hasil analisis utama. Kombinasi berbagai sumber data ini mendukung triangulasi dan memperkuat

#### **1.7.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan secara paralel melalui survei dan wawancara yang dilaksanakan bersamaan di dua wilayah utama (urban dan rural). Survei dilakukan secara online maupun manual, sementara wawancara semi-terstruktur diproses dengan rekaman dan transkrip verbatim. Semua proses pengambilan data dilakukan dengan menerapkan protokol etika penelitian: *informed consent*, kerahasiaan, dan hak partisipan untuk mengundurkan diri kapan saja. Dokumentasi pendukung meliputi catatan lapangan, observasi kontekstual, dan audit trail teknis penelitian.

#### **1.7.4.4. Teknik Analisis Data**

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk merangkum pola utama persepsi afeksi responden, memberikan gambaran distribusinya pada setiap kategori dan indikator, serta visualisasi data dalam bentuk grafik untuk mengidentifikasi tren serta hubungan antara variabel (Cooksey, 2020).

Untuk menjamin keakuratan data, instrumen ini akan melalui uji validitas isi (*content validity*) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, yaitu

penilaian reliabilitas suatu instrumen guna memastikan konsistensi internal dari setiap dimensi pengukuran sebelum disebarkan secara luas. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen survei kebijakan publik merupakan prosedur standar untuk memastikan bahwa alat ukur benar-benar merefleksikan konstruksi sosial yang diteliti dan meminimalisir bias pengukuran (Taherdoost, 2016).

Data kualitatif dianalisis melalui langkah reduksi data, pengelompokan tema, penyajian dalam matriks atau bagan, dan penarikan makna dari narasi mendalam berdasarkan model Miles dan Huberman. Proses ini memudahkan pemetaan pengalaman, makna, dan alasan sikap informan sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang respons dan pola emosi masyarakat (Bradley et al., 2007).

Pedoman ini dirancang dengan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) yang berfokus pada eksplorasi pengalaman personal, narasi emosi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi sikap responden terhadap MBG. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik angka statistik, karena metode campuran (*mixed methods*) dalam studi kebijakan memberikan kedalaman analisis yang tidak dapat dicapai hanya dengan survei, terutama dalam memahami *interplay* antara faktor personal dan kebijakan pemerintah (Tzagkarakis & Kritas, 2023).

Penggabungan data dilakukan dengan cara menyatukan hasil statistik dan temuan naratif secara berdampingan, sehingga tercapai pemaknaan bersama dari data survei dan wawancara. Proses integrasi ini mengacu pada metode penelitian campuran (*mixed methods*) agar penafsiran akhir benar-benar mencerminkan

gabungan antara kecenderungan angka dan temuan tema dari lapangan (Creswell & Inoue, 2025).

Pedoman wawancara mencakup tiga tema utama: (1) pengalaman langsung dengan implementasi MBG, (2) artikulasi emosi spesifik yang dirasakan (antusias, cemas, atau marah), dan (3) pengaruh lingkungan sosial atau identitas kelompok terhadap pandangan mereka. Penggunaan wawancara mendalam dalam riset emosi politik sangat krusial untuk menangkap nuansa afektif yang kompleks, seperti bagaimana kecemasan memicu pencarian informasi atau bagaimana kemarahan memobilisasi opini kritis di tingkat akar rumput (Morrell et al., 2022). Butir pernyataan kuesioner dan pedoman wawancara selengkapnya akan disajikan pada bagian lampiran.